

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum menjelma sebagai Negara yang disebut Turki saat ini, Turki dahulu disebut sebagai Kerajaan Ottoman (Turki Utsmaniyah). Dimana pada era tahun 1453 Kerajaan Ottoman dikenal sebagai sebuah kesatuan yang sangat kuat bahkan mampu untuk menaklukkan Konstantinopel yang pada era tersebut sangat sulit untuk diruntuhkan bahkan untuk dipengaruhi oleh siapapun. Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Byzantium yang agung, jatuh ke tangan tentara Ottoman Turki yang telah mengepung kota selama tujuh minggu. Selama tiga hari, sang pemenang, Sultan Mehmed II yang berusia 21 tahun mengizinkan para tentaranya untuk memporakporandakan kota, merampas apapun yang mereka temukan. Dari sudut pandang para penguasa Eropa, hal tersebut merupakan malapetaka bagi negara-negara Kristen: keseimbangan kekuasaan di dunia telah berubah untuk selamanya. Hampir selama tiga dekade kemudian, Ottoman memukul lebih dalam di Eropa, menyerbu kota Otranto di sebelah selatan Italia, dan mengeksekusi lebih dari 800 penduduk yang menolak memeluk Islam. (Sooke, 2015) Kerajaan Ottoman sendiri memperoleh masa kejayaan ketika berada dibawah kepemimpinan Sulaiman al-Qonuni bin Salim yang pada saat itu mendapat julukan *Suleiman the Magnificent*. (Antika, 2016)

Dalam menjalankan pemerintahannya pun, Kerajaan Ottoman bergerak degan sangat modern. Akan tetapi meskipun mereka modern, tidak ada stupun aturan atau kebijakan yang bertentangan syariat Islam. Dimana di era kerajaan Ottoman dibawah kepemimpinan Sulaiman ini sangat memegang teguh prinsip syariat Islam. Di era ini pun Kesultanan Turki juga mampu melebarkan pengaruhnya di

banyak sekali negara seperti Mesir, Iraq, Syria bahkan Palestina.. (Antika, 2016)

Turki setelah menjalani masa kejayaan di era Kerajaan Ottoman kemudian menjadi negara yang terkenal dengan sekulerismenya yang sangat kuat. Di era kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk lah Turki menjelma sebagai negara yang menganut sekulerisme. Atatürk mengganti Syariah Islam dengan peraturan sipil Eropa yang bertentangan dengan Islam. Atatürk pun juga menerapkan prinsip-prinsip sekulerisme yang amat kuat di pemerintahan Turki. Implementasi prinsip-prinsip sekulerisme dalam konstitusi ini bisa dilihat dalam kebijakan dimana dilarangnya kaum muslim untuk melakukan adzan dengan bahasa Arab. Atatürk juga melakukan reformasi secara radikal untuk mengubah tatanan umat muslim di Turki. Sistem pemerintahan Turki dibawah Atatürk dikenal sebagai sebuah masa yang sangat diktator, hal ini terpampang jelas pada hukum-hukum serta pengadilan yang membungkam habis kaum oposisi. Kaum oposisi di tahun 1925-1927 benar-benar tidak mendapatkan tempat di sistem politik Turki kala itu. Apalagi setelah Turki mendeklarasikan bahwa politiknya hanya menganut sistem 1 partai saja. Bahkan di era tersebut meskipun terjadi beberapa kali pemberontakan yang dilaukan oleh oposisi, hal tersebut mampu diatasi dengan mudah oleh pemerintah. (Muhaimin, Mengintip Sekularisme di Turki dari Atatürk hingga Erdogan, 2018)

Tahap atau fase sekularisasi yang cukup mencengangkan adalah dihapus serta ditutupnya ketentuan bahwa Islam tidak menjadi Agama di Turki lagi, padahal ketentuan Islam sebagai Agama Turki sudah bejalan hampir 600 tahun lamanya. Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Islam pun tidak ada lagi di Turki. Dihapuskannya simbol-simbol Islam juga merupakan salah satu bentuk sekularisasi yang dilakukan oleh Atatürk, hal ini bisa dilihat dengan jelas dengan kebijakan mengganti penggunaan kopyah menjadi topi koboi. Serta

adanya batasan-batasan menggunakan pakaian islam di tempat umum di Turki. Setelah melewati masa yang begitu panjang dengan menganut sekulerisasi yang sangat kuat, Turki kemudian beralih menjadi negara yang lebih terbuka terhadap aturan Islam. Meskipun memang, dalam menjalankan pemerintahannya masih bersifat sekuler, akan tetapi Turki dibawah Erdogan mulai bisa menerapkan konsep Islam atau kebijakan yang agak sejalan dengan Islam didalam pemerintahannya. (Isputaminingsih, 2015)

Di era pimpinan Erdogan sekarang ini, Republik Turki mencoba untuk melanjutkan bagaimana kesultanan ottoman dulu mencapai kejayaan. Erdogan bahkan berpendapat bahwa akar sejarah yang paling penting di Republik Turki adalah sejak tahun 1435, bukan seperti kebanyakan orang yang mengatakan bahwa tolak ukur sejarah Republik Turki adalah mulai tahun 1923. Hal ini tentu saja menunjukkan tekad yang kuat dari Erdogan bahwa Republik Turki sekarang harus bisa seperti era Kesultanan Ottoman yang dahulu. (Islam, 2018)

Turki adalah sebuah negara yang masuk di kawasan Eropa namun memiliki keadaan mayoritas penduduknya adalah muslim. Islam sendiri merupakan agama yang paling besar di Turki, karena presentase penduduk Turki yang menganut ataupun memeluk agama islam adalah 99,8%. Muslim yang berkembang di Turki ada 3 aliran, yaitu Sunni, Syiah, dan Alawiyyin. Dimana sekitar 70-80% penduduk Turki memeluk Islam Sunni, dan 20-30% adalah Alawiyyin dan Syiah. Dengan adanya fakta bahwa Turki adalah negara dengan mayoritas Islam, maka tidak heran jika Turki memiliki inisiatif yang besar untuk ikut berperan dalam kasus rohingya.

Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan memberikan perhatian luar biasa terhadap maraknya konflik yang dilatarbelakangi oleh Agama Islam. Baik itu yang melibatkan beberapa negara maupun yang melibatkan antar kelompok Islam yang memiliki pandangan berbeda. Erdogan mengatakan

bahwa ketika konflik Islam terus berlanjut, maka akan menjadi sebuah hal buruk bagi kesatuan Islam. Erdogan juga menyatakan bahwa dengan maraknya konflik tersebut, juga akan mengancam integrasi Islam secara keseluruhan. Presiden Turki yang mengatakan bahwa dirinya siap menjadi pemimpin muslim dunia akan melakukan cara dengan mempertemukan seluruh pemimpin negara Islam dunia untuk mencoba mengurangi ketegangan yang terjadi saat ini. (Sarah, 2015)

Turki sebagai negara dengan mayoritas islam juga sangat aktif untuk menyerukan bagaimana negara-negara islam harus memiliki perhatian yang lebih terhadap konflik-konflik yang dialami oleh negara-negara dengan mayoritas islam lainnya. Karena Turki sangat ingin membentuk solidaritas antar negara Islam tersebut. Selain menaruh perhatian yang sangat besar terhadap konflik rohingya, Turki juga menaruh perhatian yang cukup nesar terkait konflik Palestina-Israel. Hal ini bisa dilihat sangat jelas karena Turki sempat memberikan desakan kepada OKI untuk segera mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Palestina. Desakan ini disampaikan oleh Presiden Turki kala KTT Luar Biasa OKI tahun 2017. (Siregar, 2017)

Sedangkan untuk sejarah etnis rohingya sendiri dan bagaimana mereka bisa sampai masuk ke kawasan Negara Myanmar belum ada sejarah yang *clear*. Artinya para sejarawan masih memperdebatkan bagaimana etnis rohingya bisa masuk ke Myanmar. Ada beberapa sejarawan sendiri yang berkata bahwa kata 'Rohingya' berasal dari Bahasa Arab 'Rahma' yang memiliki arti perempuan. (Akbar, 2012). Ada beberapa sejarawan pula yang berpendapat bahwa suku/etnis rohingya berasal dari wilayah Arakan, dimana daerah itu sendiri merupakan perbatasan antara Bangladesh dengan Myanmar. Hal kecil yang sebenarnya memicu adanya perlakuan yang tidak mengenakkan bagi Etnis Rohingya adalah bahwa mereka memiliki perbedaan agama, fisik, dan Bahasa. Dimana etnis ini memiliki agama minoritas di Myanmar yaitu islam. Selain itu etnis Rohingya berbicara

dengan Bahasa Bengali. Latar belakang itulah yang kemudian mendasari pemerintahan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Bahkan Organisasi Nasional Rohingya Arakan pernah melakukan kampanye yang bertujuan menunjukkan bahwa Bahasa dan budaya etnis Rohingya beda dengan Bengali. (Joko, 2012)

Kebencian terhadap Rohingya sendiri tampaknya berawal dari dukungan Rohingya terhadap Inggris yang mengancam posisi strategis sebagian kaum elit Burma yang mayoritas Budha di zaman penjajahan Jepang. Setelah kemerdekaan Burma pun, Rohingya pernah menuntut berdirinya mereka sebagai Negara otonom sendiri. Apalagi Rohingya juga menyuarakan protes terhadap kebijakan pemerintah Burma yang menetapkan Burma sebagai Negara Budha. Tentu saja di mata pemerintahan Burma (sekarang Myanmar), aktivitas muslim Rohingya dianggap sebagai bibit tindakan pemberontakan. (Saparni, 2017)

Penyebab konflik rohingya muncul atau terjadinya kekerasan dan penindasan terhadap etnis rohingya ada beberapa poin. Yang pertama, dikarenakan faktor budaya. Sebuah negara, karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh budaya, bahkan budaya pun sangat bisa mempengaruhi ideologi negara tersebut. Di Myanmar sendiri, mereka sangat menjunjung tinggi budaya yang ada di Myanmar atau lebih sering disebut dengan Burmanization. Burmanization ini sendiri menjunjung tinggi penggunaan satu Bahasa di Myanmar, serta juga hanya mengakui satu bangsa saja. Sebenarnya pola ini tidak salah, karena memang beberapa negara di penjuru dunia juga memakai pola yang sama seperti Myanmar. Akan tetapi, dalam prakteknya pada era saat ini Myanmar terkesan sangat fundamental dan sangat anarkis. Artinya adalah Myanmar tidak bisa menerima atau tidak menginginkan budaya lain selain budaya mereka. Dengan adanya hal ini, etnis rohingya yang memiliki budaya yang berbeda kemudian tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. (Zulfata, 2017)

Hukum Kependudukan Burma 1982, menyatakan bahwa orang-orang Rohingya bukanlah suku-bangsa asli Myanmar dan secara tegas menyatakan bahwa Rohingya bukan bagian dari warga negara Myanmar. Hal ini merupakan salah satu pemicu penindasan terhadap Muslim Rohingya oleh orang-orang Burma di era ini karena mereka menganggap bahwa Rohingya tidak memiliki hak untuk menempati tanah Burma atau Myanmar. Bahkan sebelum terbitnya undang-undang 1982, militer Burma telah melakukan tindakan represif terhadap Rohingya, seperti yang terjadi pada tahun 1978. Pada saat itu, militer Myanmar mendorong 200 ribu lebih orang Rohingya keluar dari Myanmar. Bahkan militer tak segan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap orang-orang Rohingya. Ini juga terjadi pada 1999 dan 2000, namun kali ini aktornya merupakan etnis Burma itu sendiri, bukan militer. (Makdori, 2017)

Selain itu, penyebab terjadinya konflik etnis dirohingya adalah bahwa penduduk etnis rohingya ini adalah penduduk yang hampir berjumlah 1 juta jiwa di kawasan Rakhine. Akan tetapi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, mereka belum menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Yang menjadi kelompok masyarakat terbesar di Rakhine adalah penduduk yang beragama Buddha. Dengan hal ini, penduduk Rakhine yang beragama budha merasa bahwa ada diskriminasi secara budaya, dan juga secara ekonomi. Etnis rohingya dianggap sebagai ancaman dan saingan terhadap identitas penduduk Rakhine sendiri. Dengan adanya anggapan terhadap etnis rohingya yang seperti ini, maka tentu saja ketegangan antara 2 kelompok ini tidak bisa dihindarkan dan tentu saja konflik antar 2 kelompok masyarakat ini sangat sulit untuk dihindari. Karena nyatanya memang sudah sering sekali terjadi konflik diantara 2 kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, fakta yang ada juga menyebutkan bahwa kelompok Rakhine ini merasa dikhianati oleh etnis rohingya secara politis. Hal ini karena sebagian besar etnis rohingya tidak memberikan suara terhadap partai politik mereka. Dengan

adanya fakta tersebut juga menyebabkan ketegangan antara 2 kelompok masyarakat ini semakin menegang dan memperkeruh suasana. (Wolf, 2015)

Selain itu, warga rohingya dianggap oleh kelompok Rakhine sebagai beban dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di wilayah Rakhine adalah penduduk yang belum cukup baik kondisi perekonomiannya. Sehingga etnis rohingya ini dianggap sebagai beban dan pesaing bagi warga Rakhine untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pandangan fundamental para kelompok masyarakat Buddha yang beranggapan bahwa penduduk rohingya yang beragama islam akan mendesak dan menggeser kebudayaan juga menjadi pengaruh besar dalam hal timbulnya gesekan antara kedua kelompok tersebut.

Secara historis, Turki memiliki alasan yang sangat kuat untuk kemudian ikut serta dalam upaya untuk mengambil peran dalam kasus krisis Rohingya di Myanmar. Dalam catatan sejarah, sejak pertengahan abad ke-19, minoritas umat Muslim di Myanmar atau yang dulu dikenal sebagai Burma telah memulai ataupun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kesultanan Ottoman, dimana terjadi surat menyurat sejak tahun 1870.

Tercatat hubungan umat Muslim di Myanmar dengan Ottoman juga terjadi saat pembangunan sebuah proyek penting yaitu jalur rel kereta api dari Istanbul ke Mekkah. Bersama komunitas umat Muslim di Nusantara (termasuk Indonesia dan Malaysia) umat Islam di Myanmar juga mengambil bagian dalam proyek ini dengan mendukung dan menyumbang untuk proyek tersebut. Dari akar sejarah di atas, ini membuktikan bahwa hubungan antar Turki dan Umat muslim Myanmar sudah terjalin meski tidak terlalu dominan bagi Ottoman. Ini menjadi kesadaran bersama di bawah kepemimpinan Erdogan yang ingin membawa Turki menjadi Neo-Ottoman, yang besar, kuat, dan menyatukan semangat Islam di semua penjuru

dunia. Untuk mewujudkan *grand design* mereka dengan jargon *Yeni Turkiye* (Turki Baru), pemerintahan Turki secara terbuka sudah melakukan langkah-langkah strategis, khususnya dengan negara-negara yang pernah menjadi bagian kekuasaan langsung Ottoman.

Di Era saat ini, Turki yang sekarang dipimpin oleh Presiden yaitu Recep Tayyip Erdogan semakin giat untuk lebih mempehatikan masalah yang terjadi di Myanmar ini. Errdogan sendiri mengatakan bahwa harusnya seluruh negara harus memiliki solidaritas yang besar untuk bersatu dan kemudian mampu menyelesaikan masalah terkait konflik etnis rohingya ini. Bahkan dalam ucapan selamat liburan yang disampaikan kepada rekan di Kazakhstan, Senegal dan Nigeria, Erdogan pun menekankan pentingnya kerjasama guna menyelesaikan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Myanmar. (Agency, 2017)

B. Rumusan Masalah

Mengapa Turki membuat kebijakan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Rohingya serta bekerjasama dengan organisasi internasional guna mengupayakan berakhirnya konflik genosida etnis rohingya di Myanmar?

C. Kerangka Teoritik

1. Teori Konstruktivis

Teori Konstruktivis, 50 tahun yang lalu adalah sebuah teori ataupun gagasan pemikiran yang masih awam di dunia hubungan internasional. Akan tetapi, di era 2001n, konstruktivis mulai menjadi sebuah teori ataupun pendekatan yang sangat lazim dan *mainstream* di ilmu hubungan internasional.

Sebagai teori alternatif dalam studi HI, konstruktivisme mempunyai beberapa asumsi dasar yang berbeda dengan teori arus utama di dalam ilmu hubungan internasional. Khususnya dengan teori neorealisme, dimana teori ini cenderung berfokus pada aspek material (misalnya,

kekuatan militer dan kemampuan ekonomi) dalam menentukan keseimbangan kekuatan antar negara, serta menjelaskan perilaku diantaranya. Sebaliknya, konstruktivisme berpendapat bahwa aspek hubungan internasional yang paling penting adalah dunia sosial (Jackson & Sørensen, 2013/2014).

Selain itu, asumsi konstruktivisme seperti diungkapkan oleh Jackson & Sørensen (2013/2014: 365) bahwa, “sistem Internasional tidak ada dengan sendirinya, sistem internasional hanya ada sebagai kesadaran intersubjektif–pemahaman umum–diantara aktor dalam sistem tersebut”. Artinya, sistem internasional dibentuk berlandaskan pemahaman bersama dari para aktor (negara/nonnegara) yang terlibat dalam dinamika kebijakan tersebut.

Selanjutnya Andrew Philips mengatakan, sebagai pendekatan yang mengkritik teori-teori sebelumnya, teori konstruktivis menekankan keutamaan variabel-variabel nonmaterial seperti norma-norma, kebudayaan, identitas, dan gagasan untuk menjelaskan perilaku agen atau aktor (Dongoran, 2016: 69-70).

Menurut Alexander Wendt yang juga merupakan salah satu penggagas konstruktivisme, properti atau karakteristik interaksi antar aktor yang menciptakan motif dan tingkah laku berdasarkan pemahaman pribadinya. Wendt juga berargumen bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam konstruktivisme, yakni: 1) negara sebagai unit prinsipil untuk analisis teori politik, 2) fitur terpenting adalah intersubjektivitas, ketimbang material, 3) identitas dan kepentingan dibentuk oleh struktur sosial (eksogen-endogen), bukan secara eksogen dideterminasi sifat dasar manusia. Identitas mendahului kepentingan, karena aktor tidak dapat mengetahui dan menentukan yang diinginkan sebelum mengetahui siapa dirinya dan dalam prosesnya menjadi sangat relatif, tergantung pada konteks kultural tertentu. Dalam prinsip ini sangat jelas maksud dari

Wendt ialah sebuah identitas nasional negara akan menjadi kunci utama bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana bentuk dari kebijakan tersebut. Serta agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan identitas dan kepentingan nasional sebuah negara. Wendt juga berpendapat bahwa identitas nasional adalah sebuah alat untuk mengendalikan aktor untuk membuat keputusan atau kebijakan. Karena ketika mengetahui apa identitas nya, berarti ia juga tau apa yang ingin dicapai. (Behraves, 2011)

Identitas nasional juga merupakan urusan yang penting dalam konstruktivisme. Dimana identitas nasional menjadi kunci dari sebuah interaksi internasional sebuah negara. Wendt memosisikan identitas nasional sebagai “properti atau bahan subjektif dari aktor yang disengaja yang memotivasi aktor politik membuat sebuah kebijakan” dimana semua berakar pada pemahaman identitas tersebut. Identitas nasional sendiri terbentuk dari struktur internal maupun eksternal aktor tersebut. (Behraves, 2011)

Jadi dari beberapa asumsi dasar yang dimiliki oleh teori konstruktivis ini, dapat dicerna bahwa konstruktivis menekankan pentingnya faktor non material seperti norma, identitas nasional, dan gagasan untuk terciptanya atau menentukan sebuah kebijakan ataupun keputusan untuk terciptanya sebuah stabilitas dalam dunia internasional. Berikut ini akan dijelaskan mengenai salah satu konsep yang penting dalam konstruktivis yaitu identitas nasional

2. Konsep Identitas Nasional

Identitas Nasional pada hakikatnya adalah sebuah manifestasi nilai nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri ciri khas yang tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.

Fungsi identitas nasional yaitu 1) identitas nasional merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai identitas individu dalam ruang global melalui identifikasi dari kebangsaan; 2) identitas nasional menawarkan renewal dan penghargaan dengan menjadi bagian dari komunitas politik yang bersifat —super family; dan 3) identitas nasional merealisasikan perasaan yang —fraternl khususnya melalui penggunaan simbol-simbol identitas ataupun seremonial. (Noormansyah, 2014)

Dalam mengukur implementasi identitas nasional, indikator-indikator yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu 1) kesadaran diri kolektif meliputi pernyataan dan diskusi identitas nasional yang dapat diamati di surat kabar, majalah, televisi, radio, dan pernyataan mengenai —Who we are? dalam karya fiksi, film, pertunjukan, dan musik; 2) batas-batas yang jelas: persepsi geografi, bahasa, budaya yang dikontestikan dengan pengakuan batas negara; 3) kontinuitas ruang dan waktu: menunjukkan identitas nasional dalam pergaulan lintas batas dan waktu; 4) komunikasi dan interaksi; 5) integrasi dengan dunia; 6) visi jangka pendek maupun panjang: inventualisasi identitas nasional dengan menjauhkan diri dari kontroversi, pertentangan, dan perdebatan; 7) penilaian media, berita, debat, dan komentar; dan 8) tanggung jawab dari setiap aksi, karena menunjukkan posisi dalam penyandangan identitas nasional.

Identitas negara dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan sebuah negara. Konstruktivisme beranggapan bahwa identitas adalah entitas yang terkonstruksi secara sosial yang dapat mempengaruhi sebuah negara dalam bertindak dan menentukan sikap terhadap lingkungan internasional. Hal ini dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan akan didasari pada sebuah kepentingan apakah negara akan mempertahankan, memodifikasi, atau merubah identitasnya (Rosyidin, *The Power Of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*, 2014)

Dengan adanya sebuah identitas nasional yang melekat pada negara Turki yang merupakan negara yang mayoritas penduduknya Islam, serta latar belakang dimana Turki dahulu sebagai kesultanan ottoman yang kuat dan sangat ingin meluaskan pengaruh nya utamanya terhadap Negara-negara Islam. Maka dengan diadopsinya teori identitas nasional ini menunjukkan bahwa Turki dengan karakteristik yang hamper sama dengan etnis rohingya di Myanmar yaitu sama-sama Islam, membuat Turki merasa perlu untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap kasus konflik rohingya ini dikarenakan adanya kesamaan identitas dari kedua belah pihak yaitu antara Turki dengan kaum etnis rohingya. Serta dalam upaya bagaimana Turki mencoba untuk membangun kekuatan seperti di era kesultanan ottoman yang dahulu sangatlah hebat dan kuat.

3. Konsep Neo-Ottomanism

Konsep neo-Ottomanism adalah sebuah identitas politik baru di Turki, dimana identitas politik ini adalah upaya untuk membuat jalannya politik atau pemerintahan di Turki sejalan dengan syari'at Islam. Bentuk dari neo-Ottomanism ini juga sebagai identitas nasional Turki di era yang baru. Gagasan pokok atau ide utama dari identitas ini tentu saja membuat Islam di Turki bisa menyatu dengan politik, dimana di era sebelumnya jalannya pemerintahan di Turki tidak diimbangi dengan adanya syari'at Islam yang kuat. Bahkan, Turki benar-benar menjadi negara yang sekuler. Dimana jelas dengan adanya identitas nasional ini, diharapkan Turki sebagai negara dengan mayoritas muslim mampu untuk berkembang di sektor ekonomi, stabilitas politik, dll. Bahkan pada tahun 1997 pada saat konvensi refah ke-5, Erbakan mengatakan bahwa akan menjadikan Turki berjaya seperti di era Ottoman dahulu. Pandangan neo-Ottomanism sendiri adalah memilah aspek yang ada di era Ottoman yang bisa digunakan dan relevan untuk lebih memajukan Turki. Dalam membangun identitas sebagai neo-Ottomanis, Turki sangat berpegang pada sejarah kesuksesan yang dahulu di raih di era Kesultanan Ottoman.

Jadi secara histori kuat, sehingga identitas baru namun berdasarkan pengalaman di masa lampau. Neo-ottoman juga berhubungan dengan sejarah pada saat Ottoman dulu dengan kekuatan muslim yang luar biasa mampu untuk membuat negara-negara barat takluk ditangan Turki. Dan juga muslim Ottoman mampu me manage Turki menjadi sebuah kekuatan yang sangat disegani oleh seluruh negara di dunia pada waktu itu. (Yavuz, 1998)

Neo-Ottomanisme sendiri selain memiliki tujuan internal untuk lebih bisa memajukan Turki sendiri, juga memiliki tujuan di kancah dunia. Dimana dengan neo-ottomanism ini ketika kekuatan islam di turki benar-benar solid maka harapannya turki bisa menjadi negara islam yang menjadi pemimpin di dunia. (Yavuz, 1998) Terlebih lagi dengan munculnya konsep neo-ottomanism di Turki setelah Recep Tayyib Erdogan memimpin Turki. Karena dalam masa kepemimpinan Erdogan, turki tidak hanya menjadi sebuah negara yang sekuler saja akan tetapi juga mulai menanamkan atau melaksanakan nilai-nilai islam yang cukup kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Dimulai ketika tahun 2007, Erdogan mulai mengembalikan aturan diberlakukannya belajar Al-Qur'an di sekolah sekolah. Lalu juga ada kebijakan bebas mengenakan hijab di kampus kampus di Turki yang sebelumnya ada larangan mengenai pemakaian hijab di kampus tersebut secara menyeluruh di Turki.

Dengan perilaku berupa keteladan yang baik, inilah merupakan kunci tindakan Erdogan dalam membuka pemikiran masyarakat Turki terhadap kharisma Erdogan yang menjadi teladan bagi masyarakatnya. Selain itu Erdogan dengan modal Ismisme dari keijakan politiknya, Erdogan mampu membangkitkan semangat Islamisme terhadap masyarakat Turki. Ia mengatakan, "kami memiliki senjata yang tidak kalian miliki. Senjata itu adalah keimanan. Kami memiliki akhlak Islam, teladan bagi umat manusia, Rasulullah Saw."hal tersebut sesuai dengan konsep humanisasi yang

berupa; manusia harus memusatkan kepada Tuhan yang berwujud keimanan.

Erdogan meyakinkan rakyatnya, bahwa dengan identitas Islam, Turki bisa mengembalikan kejayaan Kekhalifahan Utsmani, kekhalifahan yang tidak hanya kuat dari segi pertahanan, tapi juga dalam perekonomian. Pada masa lalu, kekuasaan Khilafah Utsmaniyah mampu membuka jalur-jalur perdagangan ke berbagai belahan dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Dengan keyakinan bahwa "Islam adalah Solusi" (Al-Islama huwa al-hal), menjadikan Erdogan merupakan contoh politisi atau pemimpin yang agamis. Terlihat ia pun berusaha tidak larut dalam kekuasaan, sehingga melupakan identitas keislamannya. Jejak rekamnya dalam membela kaum muslimin yang tertindas, terutama di Palestina, sudah tidak diragukan lagi. Begitu pun kritik-kritiknya terhadap Barat, terutama yang tergabung dalam Uni Eropa, terkait persoalan hak-hak asasi umat Islam yang terkadang mendapatkan perlakuan zalim.

Kemajuan Turki dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa dari semua negeri di Timur Tengah. Turki adalah negeri yang paling cocok untuk perkembangan demokrasi. Perkembangan institusi-institusi demokrasi sedikit demi sedikit tetapi tetap, adalah suatu bukti bahwa di Turki terdapat pembawaan yang asli di antara rakyatnya untuk mendapatkan tatanan sosial yang progresif dan demokratis. Sebaliknya, kebangkitan kembali Islam telah menolak konsepsi yang salah di antara para pengamat Barat, bahwa Islam dan demokrasi adalah tidak bias berjalan bersama-sama. Memang mungkin juga ada beberapa kesalahan dalam menerapkan demokrasi di Turki, dari pandangan Barat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa arah perkembangannya adalah menuju kepada system yang lebih baik, yang didasarkan kepada struktur ekonomi yang mencukupi diri sendiri. (Junaidi, 2016)

Terkait dengan adanya islamisasi yang semakin kuat di Turki, serta dengan adanya islamisasi tersebut Turki menjadi salah satu negara yang kuat dan disegani di eropa. Hal ini menjelaskan bahwa konsep neo-ottomanism Turki dibawah kepemimpinan Erdogan sangat kental. Dimana jelas konsep ini bertujuan agar Turki mampu menjadi negara yang berpolitik dengan baik dan menciptakan kesejahteraan sosial dan maupun ekonomi bagi rakyatnya tanpa menghapus nuansa islam. Selain itu, konsep ini muncul jelas bawasannya Erdogan ingin menjadi negara islam terkuat yang memiliki pengaruh besar di dunia. Terlebih juga Turki sudah sangat aktif dalam membantu penyelesaian konflik yang terkait dengan masalah negara-negara muslim.

D. Hipotesis

Dari pemaparan latar belakang diatas beserta penjelasan mengenai teori serta konsep yang ada, maka dugaan sementara mengapa turki terlibat dalam upaya penyelesaian konflik rohingya ialah

1. Karena Turki dan Rohingya memiliki idemtitas yang hampir sama yaitu latar belakang agama Islam yang cukup kuat
2. Turki meningkatkan citra di mata internasional sehingga bisa menjadi negara mayoritas Islam yang kuat dan disegani di dunia melalui konsep neo-ottoamnis yang digalakkan oleh Turki.

E. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan dengan tema besar dalam skripsi ini yaitu mengenai upaya Turki dalam penyelesaian konflik etnis rohingya, untuk jangka waktu mulai dari 2012- sekarang. Dimana dalam kurun waktu tersebut Turki sangatlah aktif dalam upaya penyelesaian konflik etnis rohingya di Myanmar dengan cara mengirim bantuan-bantuan kemanusiaan serta dengan adanya upaya internasionalisasi konflik tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian Metodologi

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa kualitatif. Dimana dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Turki dalam upaya penyelesaian konflik etnis rohingya di Myanmar serta alasan Turki mau untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Menurut Bogdan dan Taylor definisi dari penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penggunaan data yang dipilih oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat dokumen atau orang lain. (Sugiyono, 2017) Dimana data dalam penelitian ini sendiri bisa didapatkan melalui artikel, dokumen, jurnal, buku, serta bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literature yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi pustaka ini tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang diketahui banyak orang. Yang dimaksud disini adalah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004)

G. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi kali ini, akan disajikan dengan pembahasan dimana menurut pembagian bab-bab nya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang mengandung isi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini latar belakang masalah digunakan untuk melandasi penelitian ini. Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan lah dalam perumusan masalah yang dikaji serta yang dianalisis didalam penelitian. Kemudian kerangka teori digunakan penulis dalam menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang sudah diajukan. Lalu metode penelitian digunakan untuk mempermudah penelitian, dimana akan dijelaskan mengenai bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Lalu ada juga jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan guna memberi gambaran susunan penelitian ini.

BAB II Transformasi Politik Luar Negeri Turki, dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana perubahan orientasi politik luar negeri Turki dari Era Mustafa Kemal Atatürk hingga memasuki era Recep Tayyip Erdoğan secara detail.

BAB III Akar Munculnya Konflik Etnis Rohingya di Myanmar & Bentuk Kebijakan Turki dalam menangani konflik Rohingya, dalam bab ini berusaha memaparkan dan menjelaskan konflik rohingya yang terjadi di Myanmar secara detail dan mencakup semua aspek yang ada di dalam konflik tersebut. Dimana penulis akan mencoba memberi gambaran yang lebih jelas mengenai apa itu etnis rohingya, bagaimana kedudukannya di Myanmar, dan juga bagaimana konflik etnis rohingya bisa terjadi. Serta akan dijelaskan bagaimana bentuk kebijakan yang dibuat oleh Turki dalam upaya menangani konflik etnis Rohingya

BAB IV Motivasi Turki melakukan upaya penyelesaian konflik etnis Rohingya, dalam bab ini penulis berusaha memaparkan tentang faktor apa saja yang menjadi latarbelakangi Turki dalam membuat kebijakan upaya penyelesaian konflik etnis Rohingya secara detail. Selain itu dalam bab ini akan dijelaskan mengenai apa keuntungan yang Turki raih dengan ikut berperan dalam penyelesaian konflik etnis rohingya.

BAB V Kesimpulan, bab ini akan memaparkan tentang penarikan kesimpulan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya.